

## Pemulihan Ekonomi dan Vaksinasi: Indonesia di Persimpangan Jalan

Dradjad H. Wibowo

Ekonom senior, INDEF; Ketua Dewan Pakar PAN

Pada tanggal 9 Desember 2020 Indef mengadakan konferensi internasional secara virtual, bertema “*Sustainable development and its challenges in the changing world*”. Mantan Wapres Jusuf Kalla dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sambutan utama. Pembicaranya adalah 3 profesor dari Jepang, India, dan Inggris, seorang dosen dari Belanda, dan saya. Sebagai anggota PEFC Board di Jenewa dan Ketum IFCC, tentu saya memaparkan tentang bagaimana sertifikasi kelestarian menjadi alat pasar yang “berhasil memaksa” korporasi global memenuhi standar kelestarian, dan membantu Indonesia memulihkan ekspor.

Selain isu tersebut, poin utama saya yang lain adalah tentang penanganan pandemi COVID-19 sebagai pemenuhan tujuan ketiga dari *Sustainable Development Goals*, yaitu *good health and well-being*. Karena kita tidak disiplin menjalankan tindakan kesehatan publik (TKP), penanganan pandemi Indonesia banyak dinilai tidak memadai. Majalah *Forbes* (5/6/2020) bahkan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-97 dari 100 negara, jauh di bawah Vietnam (20); bahkan di bawah Myanmar (83) dan Bangladesh (84).

Sejak Maret 2020 saya sering menyuarakan bahwa pemulihan ekonomi itu tergantung pada penanganan pandemi. Karena itu, penanganan pandemi harus diutamakan. Ini berarti, berbagai TKP perlu dijalankan dengan ketat dan disiplin, salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saya sering katakan “tangani pandeminya, ekonomi akan ikut”.

Argumen tersebut sekarang terbukti dengan keberhasilan Vietnam dan Taiwan, dua negara yang sering saya jadikan contoh. Mari kita lihat tabel berikut.

**Tabel 1 Kinerja Indonesia, Vietnam dan Taiwan**

		Indonesia	Vietnam	Taiwan
Populasi tengah tahun 2020		273,523,615	97,338,579	23,816,775
COVID-19 *)				
Jumlah kasus		569,707	1,365	693
Meninggal		17,589	35	7
COVID-19 / 100,000 penduduk *)				
Jumlah kasus		208.28	1.40	2.91
Meninggal		6.43	0.04	0.03
Pertumbuhan ekonomi (% , y-o-y)				
Q1/2020		2.97	3.82	2.51
Q2/2020		-5.32	0.39	-0.58
Q3/2020		-3.49	2.62	1.59
Note:				
*) Data per 6 Desember 2020				

Sumber: Wibowo, DH (2020). "The political economy of sustainable development in Indonesia". *Indef's International Conference "Sustainable development and its challenges in the changing world"*. Jakarta, 9 Desember 2020.

Kita tidak disiplin menjalankan TKP karena takut perekonomian terpuruk. Sebaliknya, Vietnam dan Taiwan sangat disiplin menjalankan TKP. Hasilnya? Per 6 Desember 2020, jika dihitung per 100 ribu penduduk, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia adalah 72-149 kali lipat dari Vietnam dan Taiwan. Jumlah meninggal bahkan hingga 161-214 kali lipat dari mereka.

Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Vietnam tetap tumbuh positif di triwulan 1-3/2020. Taiwan hanya berkontraksi -0,56% pada triwulan 2/2020, tapi sudah positif di triwulan 3/2020. Indonesia justru terkena resesi.

Kesimpulannya, kedisiplinan Vietnam dan Taiwan membuat pandemi terkendali. Ekonominya cepat pulih, malah bisa positif selama pandemi. Ketidaksiplinan Indonesia membuat pandemi sulit dikendalikan, tapi ekonominya malah resesi. Bahasa awamnya, *pandemi nggak dapet, ekonomi nggak dapet juga*.

### **Vaksinasi**

Dengan kinerja di atas, harus diakui kita salah memilih jalan. Ini kesalahan kolektif karena masyarakat juga susah berdisiplin menjalankan TKP. Namun tanggung jawab terbesar tetap pada pemerintah yang mengambil kebijakan. Karena itu saya berharap pemerintah, khususnya Presiden, legowo mendengarkan opini kedua (*second opinion*) yang berbasis ilmiah. Legowo mengkaji ulang jalan mana yang terbaik, karena pandemi ini masalah bersama.

Kelegowoan di atas menjadi sangat penting dalam soal vaksinasi. Kenapa? Karena vaksin adalah harapan terbaik dunia untuk mengalahkan pandemi. Bagi perekonomian Indonesia, vaksin juga harapan terbaik untuk pemulihan konsumsi rumah tangga, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Kita tahu, pertumbuhan ekonomi dan konsumsi itu sangat erat hubungannya. Selama pandemi, ekonomi berkontraksi karena konsumsi tumbuh negatif. Konsumsi berkontraksi karena rumah tangga atas/menengah belum percaya diri. Mereka menahan pergerakan fisik dan daya belinya. Padahal, rumah tangga atas itu menyumbang 45,36% dari konsumsi pada tahun 2019. Sumbangan kelas menengah 36,93% dan bawah 17,71%. Di sisi lain, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) banyak tergantung kelas atas dan menengah sebagai pebisnis/investor. Mereka menahan dananya karena investasi pada saat pandemi masih tinggi risikonya.

Vaksinasi bisa memulihkan kepercayaan diri mereka, sehingga konsumsi dan investasinya pulih kembali. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk memilih jalan vaksinasi yang terbaik. Kata kuncinya adalah standar ilmiah dunia.

### **Standar ilmiah dunia**

Saat ini dua vaksin yang sudah memenuhi standar ilmiah dunia adalah Pfizer/BioNTech dan Moderna. Negara yang membeli vaksin Pfizer/BioNTech juga sudah memulai vaksinasi. Selain Inggris, AS dan Uni Eropa, pada tanggal 24 Desember 2020 Mexico, Chile dan Kosta Rika juga memulainya. Singapura akan melakukan vaksinasi pada 30 Desember 2020. Beberapa pekan ke depan, beberapa negara juga akan melakukannya dengan vaksin Moderna.

Sejak 6 Desember 2020 Indonesia sudah mempunyai stok 1,2 juta dosis vaksin Sinovac, yang disebut CoronaVac. Indonesia memang mengandalkan CoronaVac. Masalahnya, data tentang efikasi, keamanan, dan efek samping CoronaVac berdasarkan uji klinis fase 3 masih belum diumumkan oleh Sinovac. Berita yang muncul justru secara ilmiah membingungkan.

Sebagai contoh, efikasinya dilaporkan antara 50%-90% di Brazil dan 91,25% di Turki. Jadi selang 95% *confidence interval* (95% CI) dari efikasi CoronaVac terlihat sangat lebar. Di sisi lain, data Turki diperoleh hanya dari 1.332 peserta uji klinis. Jumlah ini relatif sedikit. Sementara di São Paulo, Brazil, jumlah pesertanya disebut 9.000, terakhir 13.000. Di Indonesia sendiri pesertanya hanya 1.620.

Hal ini berbeda dengan vaksin Pfizer/BioNTech. Laporan uji klinis fase ke-3 nya dipublikasikan di *the New England Journal of Medicine* (NJEM), sebuah jurnal kedokteran ternama, pada 10 Desember 2020. Datanya pun disajikan secara transparan. Jumlah peserta uji klinis 43.448 orang, di mana 21.720 orang divaksinasi dan 21.728 plasebo. Dari 36.523 peserta yang tidak terinfeksi SARS-CoV-2 sebelum maupun pada saat vaksinasi, minimal 7

hari setelah dosis kedua terdapat 8 orang penerima vaksin dan 162 orang plasebo yang positif COVID-19. Efikasinya 95% dengan 95% CI pada selang [90,3-97,6].

Untuk vaksin Moderna, terdapat 30.400 peserta uji klinis fase 3. Dalam analisis interimnya, mulai 14 hari setelah dosis kedua, dari 27.817 peserta terdapat 5 kasus COVID-19 di kelompok penerima vaksin dan 90 di plasebo. Efikasinya 94,5% dengan 95% CI pada selang [86,5-97,8].

Masih banyak lagi prosedur, data, dan analisis yang dilaporkan oleh keduanya, termasuk efikasi pada beberapa kondisi. Poin saya adalah, CoronaVac perlu memenuhi standar ilmiah dan transparansi yang sama dengan kedua vaksin di atas. Bahkan, data mentah pun harus diserahkan karena otoritas seperti FDA akan mengeceknya.

Pertanyaannya, kapankah hal ini bisa dipenuhi? Jika tidak, laporan uji klinisnya akan rendah kredibilitasnya. Jangan lupa, risiko penerima vaksin terkena COVID-19 itu tetap ada meskipun kecil. Namun di era medsos, berita tentang hal ini akan meledak dan bisa merusak kepercayaan terhadap vaksinasi. Di sisi lain, jika standar ilmiah dan transparansi belum dipenuhi, berdasarkan apa BPOM mengeluarkan *Emergency Use Authorization* (EUA)?

Indonesia memang memesan vaksin lain seperti Novavax, Tapi Novavax baru mulai uji klinis fase 3 tanggal 28 Desember 2020, melibatkan sekitar 30 ribu relawan di AS dan Meksiko. Masih perlu beberapa bulan lagi untuk mengetahui hasilnya.

### **Rencana cadangan**

Saya tidak ingin membahas kenapa kita memilih CoronaVac sebagai vaksin utama. Tapi mau tidak mau, Indonesia perlu punya “Rencana Cadangan”. Ini sebagai jaga-jaga jika Sinovac terlambat memenuhi standar ilmiah dan transparansi. Jika ini terjadi, BPOM jangan memaksakan diri menerbitkan EUA. Pemerintah juga jangan intervensi politis ke BPOM. Karena, kesehatan dan nyawa rakyat yang jadi taruhannya, selain perekonomian.

Apa rencana cadangan itu? Walaupun sangat terlambat, tidak ada salahnya jika pemerintah melobby Pfizer dan Moderna. Tidak usah beli banyak, cukup 1-2 juta dosis saja untuk pengiriman segera. Syukur jika bisa mendapatkan lebih. Jika perlu, kita bayar lebih mahal. Pfizer Indonesia yang sudah berbisnis di sini sejak 1969 bisa diminta kerjasamanya.

Saya tidak yakin apakah kita bisa membeli dari tangan kedua, yaitu Singapura. Mungkin saja Pfizer dan Moderna tidak mengizinkan re-ekspor. Selain itu, bagi Singapura lebih menguntungkan jika orang kaya Indonesia yang datang ke Singapura untuk vaksinasi, dari pada menjual vaksinnya ke Indonesia.

Jika lobby berhasil, tentu tenaga kesehatan harus divaksin lebih awal. Tapi sebagian vaksinnya bisa dijual dengan harga mahal kepada pebisnis dan investor. Jika perlu, buat persyaratan bahwa mereka harus melakukan perjalanan bisnis dan wisata domestik senilai Rp X puluh juta. Bea masuk impor yang mahal, misalnya Rp 1-2 juta, juga bisa diterapkan, sehingga ada tambahan penerimaan negara. Saya yakin kelompok atas dan menengah mau membayar mahal untuk vaksin tersebut.

Program “Vaksinasi Bisnis” ini diharapkan bisa memulihkan konsumsi dan investasi rumah tangga atas dan menengah. Dengan demikian, pemulihan ekonomi bisa dipercepat.